



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIVA ZABRENO
2. Jabatan : KEPALA CABANG
3. NHK : 258948

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.940.000.000

1. Tanah Seluas 274 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/27 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 2578 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/150 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
5. Tanah Seluas 890 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 70.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.114.000.000

III. HUTANG Rp. 873.315.132

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.240.684.868

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.